



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/BADAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNG-JAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/BADAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Kepala OPD dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala OPD.
- KETIGA : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan

c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

KEEMPAT

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas;
2. Memiliki disiplin tinggi;
3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
5. Menandatangani Pakta Integritas;
6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

KELIMA

: Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KEENAM

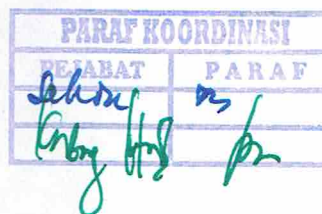
: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA
OPD/BADAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	OPD	PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Muhamad Aris Susanto, SE., ME Nip. 19750408 200212 1 006 Pembina Tkt. I, IV/b (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	Martono Samadake, A.Md Nip. 19780919 200804 1 001 Penata Muda, III/a	Muhamad Aris Susanto, SE., ME Nip. 19750408 200212 1 006 Pembina Tkt. I, IV/b (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)		
2.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Zainuddin Malotes, SE, MH Nip. 19590721 199003 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Pin A. Lantoiman, S.Sos Nip. 19810703 200604 2 025 Penata, III/c	Zainuddin Malotes, SE, MH Nip. 19590721 199003 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		
3.	Badan Pendapatan Daerah	Stevan Moidady, SE, M.Si Nip. 19701001 199903 1 009 Pembina Tk. I, IV/b (Kepala Badan Pendapatan Daerah	Marniati Ismail, SE Nip. 19810301 200701 2 010 Penata, III/c	Stevan Moidady, SE, M.Si Nip. 19701001 199903 1 009 Pembina Tk. I, IV/b (Kepala Badan Pendapatan Daerah		
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jamaluddin Ahmad, S.Sos., MM Nip. 19740614 200012 1 003 Pembina Tkt. I, IV/b (Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Benyamin Yokiman Nip. 19770225 200701 1 018 Pengatur, II/c	Jamaluddin Ahmad, S.Sos., MM Nip. 19740614 200012 1 003 Pembina Tkt. I, IV/b (Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rahmat Labou, S.STP Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Hariyani Arsyad Kay, S.IP Nip. 19840907 200701 2 001 Penata Muda, III/a	Rahmat Labou, S.STP Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF
Zain Mus

ZAINAL MUS